

**RASIONALITAS MASYARAKAT ATAS PENOLAKAN PENGGUNAAN
KOMPOR GAS BERSUBSIDI
(STUDI KASUS PADA 8 ORANG WARGA RT 2/RW 4 DI DUSUN KRAJAN
KELURAHAN SEMPUSARI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN
JEMBER)**

**THE PEOPLE RATIONALITY AGAINST REFUSAL OF SUBSIDIZED GAS
STOVE USE
(CASE STUDIES OF EIGHT PEOPLE RESIDENTS IN RT 2/RW 4
SEMPUSARI VILLAGE KALIWATES DISTRICT JEMBER REGENCY)**

SKRIPSI

Oleh:

**Auliyaa Tsanina Sari
0509103011811**

**ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2010**

PENGESAHAN

Diterima dan dipertahankan di depan penguji skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, pada:

Hari dan tanggal : 25 Februari 2010

Jam : 10.00

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Drs. Partono, M.Si
NIP: 195608051986031003

Kris Hendrijanto, S.Sos, M.Si
NIP: 19700103998021001

Anggota

Anggota

Drs. Sama'i, M.Kes
NIP: 19571124198702101

Drs. Syech Hariyono, M.si
NIP: 195904151989021001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A
NIP: 195207271981031003

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

1. Ibunda tercinta Dra. Budiarti Utomo dan Ayahanda Zam-Zam Mochtarom.SH.MM., dengan kesabaranmu ananda belajar bersyukur dengan apa yang telah ananda dapatkan. Terimakasih atas kasih sayang dan doanya sehingga ananda dapat menyelesaikan karya ilmiah ini walau agak terlambat.
2. Para guru dan teman-temanku di: TK. Amanda Jati Waringin, SDN 04 Pagi Lubang Buaya, SLTPN 81 Lubang Buaya, SMUN 62 Kramat Jati Jakarta Timur, serta para dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
3. Almamaterku Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat.

MOTTO

“...pada tahap pertama, pembelajaran membuka pintu gerbang kemungkinan untuk menjadi manusia dewasa dan mandiri. Pembelajaran memungkinkan seorang anak manusia berubah dari tidak mampu menjadi mampu atau dari tidak berdaya menjadi sumber daya, tanpa pembelajaran semua itu tidak mungkin.”

(Andrias Harefa)¹

“... kita memiliki kemampuan untuk mengambil inisiatif, untuk menunjukkan tanggung jawab terhadap setiap gagasan, kata dan tindakan kita, apa pun konsekuensi yang ditimbulkannya.”

(Andrias Harefa)²

¹ Penerbit KOMPAS, Menjadi Manusia Pembelajar, hal 36, tahun 2004

² Penerbit KOMPAS, Menjadi Manusia Pembelajar, hal 119, tahun 2004

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Auliyaa Tsanina Sari

NIM : 050910301181

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: Rasionalitas Masyarakat Atas Penolakan Penggunaan Kompor Gas Bersubsidi adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Februari 2010

Yang menyatakan,

Auliyaa Tsanina Sari
050910301181

**RASIONALITAS MASYARAKAT ATAS PENOLAKAN PENGGUNAAN
KOMPOR GAS BERSUBSIDI**
(STUDI KASUS PADA 8 ORANG WARGA RT 2/RW 4 DI DUSUN KRAJAN
KELURAHAN SEMPUSARI KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN
JEMBER)

**THE PEOPLE RATIONALITY AGAINST REFUSAL OF SUBSIDIZED GAS
STOVE USE**
(CASE STUDIES OF EIGHT PEOPLE RESIDENTS IN RT 2/RW 4 SEMPUSARI
VILLAGE KALIWATES DISTRICT JEMBER REGENCY)

SKRIPSI

Oleh:

Auliyaa Tsanina Sari
NIM.050910301181

Pembimbing:

Kris Hendrijanto, S.sos., M.Si
NIP.132 206 013

RINGKASAN

Rasionalitas Masyarakat Atas Penolakan Penggunaan Tabung Gas Bersubsidi (Studi Kasus Pada 8 Orang Warga Rt 2/Rw 4 Di Dusun Krajan Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember) Auliyaa Tsanina Sari, 050910301181; 2010; halaman; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Konversi gas dari minyak tanah ke tabung gas bersubsidi yang dilakukan pemerintah guna menangani melonjaknya harga minyak dipasaran dunia telah berjalan mereta di seluruh kota di Indonesia, namun setelah terbagi dengan merata masalah banru muncul. Hal ini dikarenakan masyarakat malah banyak yang menjual tabungserta kompor gasnya, dengan alasan ekonomi, takut meledak, maupun masalah kebiasaan yang telah membudaya menjadi alasan mereka. Hal ini sangat bertolak belakang dengan harapan adanya proses alih budaya yang diharapkan oleh pemerintah dengan maksud menghemat pengeluaran subsidi minyak sehingga bisa memberikan peluang peningkatan pada sector lainnya yang nantinya akan dirasakan oleh masyarakat. Sehingga penulis tertarik untuk mengulasnya lebih dalam yang akhirnya merumuskan masalah yang akan penulis teliti yaitu Alasan-alasan rasional apa yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan kompor gas bersubsidi?

Berorientasi dari hal tersebut, yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan rasionalitas masyarakat terhadap penggunaan kompor gas bersubsidi. Peneliti akan memfokuskan pada: alasan Internal, yaitu alasan yang muncul dari dalam individu itu sendiri, alasan internal berhubungan dengan keadaan psikologis individu. Serta alasan Eksternal, yaitu alasan yang muncul dari luar individu. Dalam hal ini alasan ekstern berhubungan dengan lingkungan sosial individu. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sedangkan untuk penentuan informan digunakan teknik purposive sampling Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian rasionalitas masyarakat atas penolakan penggunaan kompor gas bersubsidi yaitu, masyarakat memilih untuk tidak menggunakan bantuan kompor gas bersubsidi atas dasar rasionalitas pemikirannya. Ada dua alasan yang muncul dari dalam diri masyarakat yang mempengaruhi masyarakat sehingga memilih untuk tidak menggunakannya, yang pertama lebih bersifat internal karena adanya ketakutan akibat maraknya pemberitaan di televisi yang mengatakan tabung gas LPG

3kg mudah meledak. Yang kedua karena alasan butuh uang. Selain itu alasan yang muncul dari luar individu atau eksternal yang mempengaruhi masyarakat sehingga memilih untuk tidak menggunakan paket bantuan kompor gas bersubsidi adalah karena lingkungan sosial dimana masyarakat tinggal masih banyak terdapat kayu, yang selama ini menjadi bahan bakar untuk memasak, karena dirasa masyarakat belum membutuhkan bantuan kompor gas bersubsidi. Media audio visual yaitu televisi juga ikut menyumbang sehingga masyarakat memilih menggunakan paket bantuan bersubsidi. Pemberitaan-pemberitaan tentang tabung gas yang mudah meledak membuat masyarakat dihantui oleh kecemasan untuk menggunakannya. Selain itu pengaruh orang-orang lingkungan sekitar yang tidak menggunakan paket bantuan bersubsidi juga memiliki andil besar sehingga masyarakat memilih untuk tidak menggunakan paket bantuan kompor gas bersubsidi, dan menjualnya, dalam hal ini masyarakat diuntungkan secara materi. Kurangnya informasi tentang program konversi minyak tanah ke LPG 3kg kepada masyarakat juga mempengaruhi pikiran rasionalitas masyarakat dalam memilih suatu keputusan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. atas segala berkah dan limpahan kasih sayang Nya, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul *Rasionalitas Masyarakat Atas Penolakan Penggunaan Kompor Gas Bersubsidi* yang merupakan syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu, di Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada:

1. Kris Hendrijanto, S.Sos, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan hingga terselesaikannya karya ilmiah ini.
2. Drs. Hadi Prayitno, M.Kes, selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa.
3. Drs. Purwowibowo, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial
4. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
5. Camat Kaliwates, Drs Sigit Akbari, Msi, terimakasih telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian
6. Lurah Sempusari Kecamatan Kaliwates yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian
7. Kasun Krajan Kelurahan Sempusari Sukardi dan Bu Jumai Kader Posyandu, terimakasih atas semua informasinya dan telah meluangkan waktunya untuk mengantar penulis kepada informan sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan.
8. Seluruh warga Kelurahan Sempusari Dusun Krajan Rt 2 Rw 4 yang menjadi informan, terimakasih atas waktunya untuk diwawancara.
9. Pak Adi Prasetyo yang bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi sehingga memberikan penulis inspirasi pada karya ilmiah ini
10. Seluruh keluarga besarku di Bekasi, Jogjakarta dan Temanggung.

11. Kakakku, Amri Luthfi terima kasih banyak atas kesabarannya untuk setia membantuku dalam hal keuangan, Azkaa Zaky Abdillah adikku yang selalu setia menghiburku walaupun berbeda jarak, Dian “*mbok mban*”, Tyas “*mbem*”, Didit “*kuncrit*”, Winda “*emon*”, Kiky, Robit, Akbar, “*bang Dicky*”, Iyus, Agus, Antik, Vita, Ayu, Ikhsan, Fandi, terima kasih serta untuk anak kost “*Bangka 1/22*”, “*Bangka 1/23*” serta “*Bangka 4/29*” terima kasih semuanya atas “*pelajaran*” yang telah kita lewati bersama.
12. *Special thanks to:*, Diny Akbar Usman beserta keluarga yang telah menemani 3 tahun ini disaat susah dan senang, Om, Tante, Ana, Iwan, Kak Tono, Bang Sandi, Teh Nadia, Herick, Yuris terimakasih telah menganggapku bagian dari keluarga. Bersama kalian semua banyak kenangan yang tak terlupakan.
13. Sahabatku dari awal kuliah Om Jin, Pucca, Indra, Dewi, Anam, Tama, dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih dan “*maaf*”.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Jember, 18 Februari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| PERNYATAAN | v |
| RINGKASAN | vii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Pokok Bahasan | 9 |
| 1.4 Tujuan dan Manfaat | 10 |
| 1.5 Metode Penelitian | 12 |
| 1.5.1 Pendekatan Kualitatif..... | 12 |
| 1.5.2 Penentuan Lokasi Penelitian | 12 |
| 1.5.3 Penentuan Informan | 13 |
| 1.6 Metode Pengumpulan Data | 15 |
| 1.6.1 Observasi..... | 15 |
| 1.6.2 Wawancara..... | 16 |
| 1.6.3 Dokumentasi | 18 |
| 1.7 Metode Analisis Data | 19 |
| 1.8 Metode Keabsahan Data | 19 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 21 |
| 2.1 Landasan Teori | 21 |
| 2.2 Teori Kebutuhan dan Konsep Kesejahteraan Sosial | 21 |
| 2.3 Konsep Motivasi dan Tindakan Sosial | 29 |
| 2.4 Konsep Tentang Rasionalitas | 30 |
| BAB 3. HASIL DAN PEMBAHASAN | 33 |

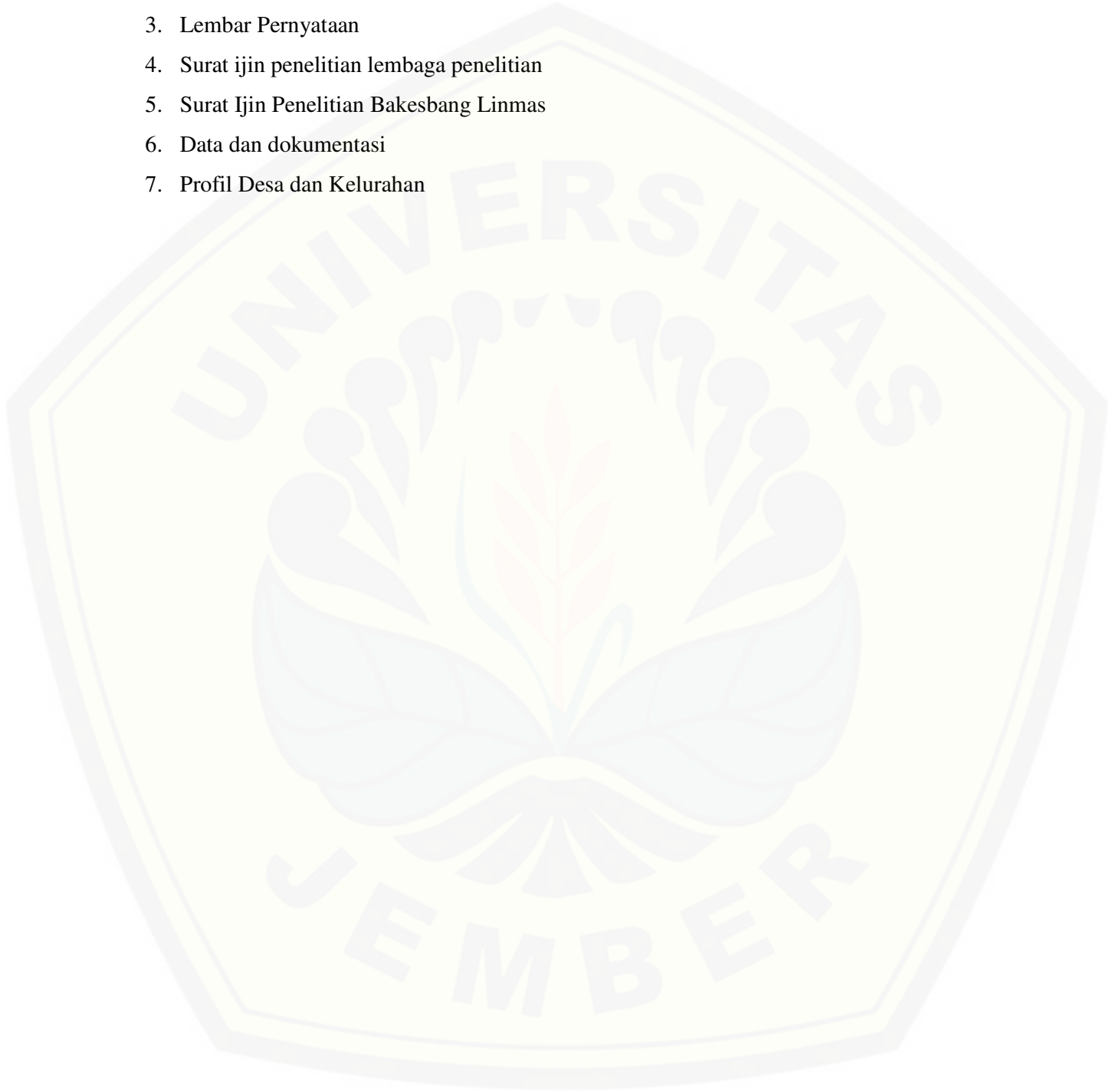
| | |
|---|----|
| 3.1 Deskripsi Lokasi Penelitian | 33 |
| 3.1.1 Gambaran Umum Kab Jember dan Kec Kaliwates..... | 33 |
| 3.1.2 Gambaran Umum Kelurahan Sempusari..... | 36 |
| 3.2 Tentang LPG 3Kg | 41 |
| 3.3 Karakteristik Informan | 43 |
| 3.3.1 Usia Informan Pokok | 45 |
| 3.3.2 Tingkat Pendidikan Informan Pokok | 46 |
| 3.3.3 Jenis Pekerjaan Kepala Keluarga Informan Pokok..... | 47 |
| 3.3.4 Tingkat Pendapatan Keluarga Informan Pokok | 48 |
| 3.4 Pengantar | 49 |
| 3.5 Rasionalitas Masyarakat | 51 |
| 3.5.1 Internal..... | 51 |
| 3.5.1 Eksternal..... | 64 |
| BAB 4. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN | 72 |
| 4.1 Kesimpulan | 72 |
| 4.2 Saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Kelurahan Sempusari..... | 34 |
| Tabel 4.2 Penggunaan Lahan di Kelurahan Sempusari | 36 |
| Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kel Sempusari Menurut Jenis Kelamin..... | 37 |
| Tabel 4.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Sempusari | 38 |
| Tabel 4.5 Tingkat Pendidikan Penduduk di Kel Sempusari | 39 |
| Tabel 4.6 Informan Tambahan..... | 43 |
| Tabel 4.7 Informan Pokok | 44 |
| Tabel 4.8 Penggolongan Informan Pokok Berdasarkan Usia | 45 |
| Tabel 4.9 Penggolongan Informan Pokok Berdasarkan Pendidikan | 46 |
| Tabel 4.10 Jenis Pekerjaan Kepala Keluarga Informan Pokok..... | 47 |
| Tabel 4.11 Tingkat pendapatan Keluarga Informan | 48 |

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara untuk informan
2. Peta Kabupaten Jember
3. Lembar Pernyataan
4. Surat ijin penelitian lembaga penelitian
5. Surat Ijin Penelitian Bakesbang Linmas
6. Data dan dokumentasi
7. Profil Desa dan Kelurahan



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Untuk meningkatkan taraf hidup manusia guna mencapai keadaan yang sejahtera diperlukan suatu pembangunan. Pembangunan disini tidak hanya berorientasi pada pembangunan ekonomi namun juga harus ditunjang dengan pembangunan kesejahteraan sosial.

Secara konseptual, pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian dari pembangunan sosial yang memberi perhatian pada keseimbangan kehidupan manusia dalam memperbaiki atau menyempurnakan kondisi-kondisi sosialnya. Dalam beberapa hal, pembangunan sosial dan pembangunan kesejahteraan sosial memiliki makna yang sama mengingat sasaran utama pembangunan tersebut adalah manusia dan lingkungannya, sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan keseimbangan sosial baik secara rohaniah maupun jasmaniah. Peningkatan kondisi kehidupan tersebut ditempuh dengan jalan menumbuhkan, membina dan mengembangkan keselarasan hidup pribadi-pribadi manusia serta menciptakan lingkungan yang lebih baik meliputi segi fisik, mental dan sosial budaya.

Seiring dengan pembangunan sosial dan pembangunan kesejahteraan sosial, masyarakat berkembang terus ke arah modern dan kompleks, maka permasalahan sosial di masyarakat menjadi semakin kompleks pula. Salah satunya adalah fenomena yang cukup membuat panik masyarakat Indonesia ketika krisis energi melanda tahun 2008. Krisis energi tidak hanya dialami oleh bangsa Indonesia saja, namun juga dialami oleh negara lainnya. Krisis energi sangat berdampak buruk bagi bangsa

Indonesia, dimana sebagian masyarakat Indonesia banyak yang bergantung pada bahan bakar mentah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Selain itu keadaan ini diperparah dengan keberadaan kurs rupiah yang terus melemah, belum lagi ditambah kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar mentah yang saat itu membuat bangsa Indonesia semakin terpuruk.

Kebijakan subsidi energi yang selama ini diterapkan, baik untuk listrik maupun bahan bakar mentah telah menjadi problematika tersendiri bagi proses pengambilan keputusan di Indonesia, dimana tidak hanya kerumitan merancang pembangunan dan menentukan prioritas dalam menyusun RAPBN (Rancangan Anggaran Pembelanjaan Negara), tetapi juga dalam bentuk besarnya subsidi terutama untuk bahan bakar mentah yang harus ditanggung setiap tahunnya. Seperti data berikut ini, dimana menyebutkan bahwa setiap tahunnya pemerintah menganggarkan dana kurang lebih Rp 50 triliun untuk mensubsidi bahan bakar mentah seperti minyak tanah, premium dan solar. Dari ketiga jenis bahan bakar ini, minyak tanah adalah jenis bahan bakar yang mendapat subsidi terbesar (lebih dari 50% anggaran subsidi bahan bakar mentah digunakan untuk subsidi minyak tanah). Dari tahun ke tahun anggaran ini semakin meningkat jumlah nominalnya, karena harga minyak dunia yang cenderung mengalami peningkatan yang sangat pesat.¹

Kenaikan harga bahan bakar mentah yang dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia menyebabkan pemerintah nyaris tidak sanggup lagi untuk menanggung subsidi karena hal itu akan menguras kas negara. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan berbentuk bantuan sosial berupa program konversi minyak tanah ke LPG yang diberlakukan sejak Mei 2007. Konversi minyak tanah ke LPG merupakan salah satu program pemerintah untuk pengalihan subsidi dari minyak tanah kepada gas, yang didasarkan pada Surat Menteri Ekonomi Sumber Daya Mineral, No.3249/26/MEM/2006. Program tersebut diimplementasikan dalam bentuk pemberian satu paket bantuan yang terdiri atas seperangkat kompor gas beserta

¹ (<http://www.pertamina.com/konversi/program.php>)

tabung gas dengan volume 3 kg beserta regulator, yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu.

Melalui program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg, harapan dari pemerintah adalah dapat menjadi upaya penghematan subsidi yang diberikan kepada minyak tanah terutama karena harga minyak tanah dunia selalu meningkat. Seperti yang dikutip dari pada buku saku Konversi Minyak Tanah ke LPG 3kg, penghematan anggaran belanja negara tersebut didasarkan pada asumsi sebagai berikut:

1. Apabila konversi telah mencapai 100 % maka akan menghemat beban subsidi sebesar Rp. 32,5 Trilyun.
2. Apabila setiap rumah tangga telah melakukan konversi dari minyak tanah ke LPG, maka dapat meniadakan penyalahgunaan serta penyelewengan minyak tanah bersubsidi.

Secara teori, pemakaian 1 liter minyak tanah setara dengan pemakaian 0.57 kg LPG. Dengan menghitung berdasarkan harga keekonomian minyak tanah dan LPG, subsidi yang diberikan untuk pemakaian 0.57 kg LPG akan lebih kecil daripada subsidi untuk 1 liter minyak tanah. Sedangkan secara nasional, jika program konversi minyak tanah ke LPG berhasil, maka pemerintah akan dapat menghemat hingga sampai Rp. 15-20 trilyun subsidi BBM per tahun. Manfaat lain yang dapat diperoleh dari konversi minyak tanah ke LPG adalah mengurangi polusi udara di rumah atau dapur, selain itu dapat menghemat waktu memasak dan perawatan alat memasak, dapat mengalokasikan minyak tanah untuk bahan bakar yang lebih bersifat komersial (misalnya bahan bakar pesawat atau avtur), meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain manfaat tersebut, penggunaan kompor gas juga memiliki kekurangan yaitu diperlukannya tabung gas yang harganya cukup mahal, memerlukan peralatan seperti kompor gas yang harganya lebih mahal dibandingkan dengan kompor biasa, dan volume tabung gas harus dibeli dalam satuan tertentu (tidak bisa mengecer). Sedangkan minyak tanah memiliki keuntungan yaitu hanya diperlukan kompor yang harganya relatif lebih murah dan bahan bakarnya dapat dibeli secara eceran. Namun, penggunaan kompor minyak tanah juga banyak kekurangan, yaitu lebih repot dalam

penggunaan, berasap dan berjelaga, meninggalkan kotor pada tembok, menyebabkan polusi, dapat menyebabkan bau pada makanan, perlu waktu lebih lama untuk memasak.² Terkait dari manfaat dan kekurangan penggunaan kompor gas tersebut, tergantung dari masing-masing individu yang menyikapinya.

Pelaksanaan program konversi minyak tanah ke LPG 3kg yang dikutip dari buku saku Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg, memiliki tiga tahapan, yaitu survey, sosialisasi dan distribusi yang nanti akan diakhiri dengan penarikan minyak tanah. Tahapan survey mencakup kegiatan menentukan area dan penerima (Rumah Tangga/Usaha Mikro) yang layak menerima paket perdana kompor bersubsidi. Kemudian tahap sosialisasi mencakup kegiatan memberikan informasi, edukasi kepada para penerima paket perdana kompor bersubsidi, persiapan agen dan pengecer. Dan yang terakhir adalah tahap pendistribusian yaitu kegiatan membagikan secara gratis paket perdana kompor bersubsidi kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria. Paket perdana konversi terdiri dari: a). Tabung LPG 3 Kg beserta isi perdana; b). Kompor gas 1 tungku beserta regulator, selang dan klem.

Pemerintah sangat berharap dengan adanya kompor bersubsidi ini dapat meringankan beban masyarakat keluarga dalam memenuhi kebutuhannya dan juga untuk menghemat penggunaan minyak tanah. Namun demikian, pada proses pelaksanaannya konversi minyak tanah ke LPG 3kg masih belum optimal, kekurangan tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan paket bantuankompor gas bersubsidi, hal ini dikarenakan sebagian masyarakat sudah terbiasa menggunakan kompor minyak atau tungku untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, terlebih isi volume tabung LPG 3 kg tidak bisa dibeli secara ecer, tidak seperti ketika warga membeli minyak tanah. Selain itu maraknya kasus tabung LPG yang sering meledak, memicu masyarakat semakin tidak tertarik untuk menggunakan kompor bersubsidi yang dibagikan pemerintah. Seperti di daerah Solo, ada sekelompok warga yang menamakan diri Forum Ibu Peduli Kota Solo, menggelar

² (<http://www.pertamina.com/konversi/program.php>)

aksi menolak adanya konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg, karena dinilai akan menyengsarakan rakyat kecil. Salah satu ibu yang ikut dalam aksi tersebut bernama Sri Y mengatakan, dengan adanya konversi jelas akan memberatkan rakyat kecil, karena kalau minyak tanah bisa dibeli eceran, tetapi kalau gas harus langsung beli tiga kilo yang harganya sampai Rp 12.500³. Tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Kota Solo, warga Kota Malang yang juga termasuk dalam sasaran program konversi minyak tanah ke LPG 3kg. Salah satu warga yang bernama Nafsiah turut mengeluhkan adanya program konversi tersebut. Beliau mengatakan bahwa, kompor gas yang dibagikan pemerintah tidak dapat memenuhi keperluannya memasak didapur, terlebih beliau membuka usaha berjualan jamu. Beliau juga mengatakan masih sangat membutuhkan minyak tanah, dan berharap konversi tersebut dihentikan karena sangat merugikannya.⁴

Kurangnya sosialisasi mengenai tujuan dan alasan sehingga dikeluarkannya kebijakan tentang program konversi minyak tanah ke LPG 3kg kepada masyarakat menyebabkan terjadinya resistensi atau penolakan kebijakan yang sebenarnya secara konseptual adalah baik. Ada kesenjangan persepsi yang cukup dalam antara pemerintah dan masyarakat yang menjadi target kebijakan konversi minyak tanah ke LPG ini. Selain itu, maraknya kasus kecelakaan yang menimpa warga akibat kesalahan ketika menggunakan kompor gas bersubsidi juga ikut mempengaruhi warga untuk tidak menggunakan. Bentuk dari penolakan yang dilakukan masyarakat terhadap program tersebut bermacam-macam, dari yang munculnya kasus kompor gas bersubsidi beserta tabung yang diperjualbelikan. Kemudian bentuk penolakan lainnya dengan tidak menggunakannya. Ada juga yang hanya menyimpan atau memberikannya kepada sanak saudara.

Fenomena tersebut hampir terjadi di seluruh kota di Indonesia, khususnya di pulau Jawa yang terlebih dahulu menerima program konversi minyak tanah ke LPG 3kg dibanding dengan pulau lainnya di Indonesia. Salah satu propinsi yang menerima

³ (<http://www.bernas.co.id/news/CyberNas//5105.htm>)

⁴ (<http://www.antara.co.id/arc/2008/9/2/warga-keluhkan-konversi-mitan-ke-elpiji/>)

program konversi minyak tanah ke LPG 3kg di pulau Jawa adalah Propinsi Jawa Timur, dengan jumlah penerima tersebar di 25 kabupaten dan kota, yang meliputi Kota Surabaya (439.733 KK), Kota Sidoarjo (107.268 KK), Kota Mojokerto (27.166 KK), Kabupaten Mojokerto (246.870 KK), Kabupaten Jombang (288.457 KK), Kota Pasuruan (40.816 KK), Kabupaten Pasuruan (367.890 KK), Gresik (135.495 KK), Lamongan (275.967 KK), Tuban (234. 576 KK). Kemudian untuk Kabupaten Malang (572.618 KK), Batu (45.907), Lumajang (259.002 KK), Kota Probolinggo (46.168 KK), Kabupaten Probolinggo (273.108 KK), Jember (590.658 KK), Bondowoso (47.128 KK), Banyuwangi (388.000 KK), Kota Blitar (26.600 KK), Kabupaten Blitar (280.062), Kota Kediri (61.079 KK), Kabupaten Kediri (367.984 KK), Tulungagung (223.507 KK), Kota Madiun (41.736 KK) Kabupaten Madiun (153.115).⁵

Dari data tersebut, terlihat bahwa Kabupaten Jember memiliki jumlah KK penerima program konversi minyak gas ke LPG 3kg paling banyak, dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur. Adapun Kecamatan di Kabupaten Jember yang telah menerima konversi minyak tanah ke gas LPG 3kg diantaranya adalah : Kecamatan Ambulu, Ledokombo, Mumbulsari, Silo, Sukowono, Sumberjambe, Tempurejo, Balung, Gumukmas, Kencong, Umbulsari, Puger, Wuluhan, Kaliwates, Bangsalsari, Jelbuk, Panti, Semboro, Sumberbaru, Tanggul, Jombang, Mayang, Pakusari, Patrang, Rambipuji, Sukorambi, Sumbersari, Jenggawah, Silo, Sukorambi, Sukowono⁶. Dari 31 kecamatan penerima program konversi minyak tanah ke gas LPG 3kg tersebut, dijumpai fenomena masyarakat yang tetap tidak menggunakan kompor gas bersubsidi meskipun sebenarnya mereka mendapatkan jatah subsidi kompor gas dari pemerintah.

Proses pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG 3kg di Kabupaten Jember sejak awalnya memang berjalan kurang lancar, sebelum konversi dilaksanakan sempat terjadi kelangkaan minyak tanah di beberapa daerah. pada awal Agustus ketika program konversi masuk wilayah Jember, banyak aksi pro dan kontra. Aksi

⁵ (www.d-infokom-jatim.go.id/hsn/toeb)

⁶ (Data Program Konversi Kabupaten Jember)

kontra tidak hanya dari masyarakat setempat namun juga dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember. Mereka menganggap bahwa program ini belum siap untuk dilaksanakan di Jember karena menurutnya masyarakat Jember masih belum siap beralih ke gas. Terlebih lagi banyak sekali kasus-kasus yang saat ini mencuat ke media cetak maupun elektronik tentang tabung LPG 3kg yang mudah meledak. Jelas sekali ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat khususnya masyarakat Jember. Sehingga anggota dewan berharap program tersebut dapat ditunda untuk beberapa waktu. Namun ternyata program tersebut tetap dilaksanakan, terbukti dengan sudah dimulainya kegiatan sosialisai yang dilaksanakan sejak awal Agustus lalu.⁷

Radar Jember Rabu, 06 Agustus 2008 juga memuat berita tentang adanya ketidaksiapan dari kalangan masyarakat Jember terhadap program konversi ini, pengakuan yang dikemukakan Ibu rumah tangga bernama Aisyah asal Kebonsari, mengatakan bahwasanya beliau tidak pernah membaca berita atau sosialisai dari RT/RW terkait konversi minyak tanah di Kabupaten Jember. Menurut beliau, untuk melaksanakan konversi, mestinya pemerintah melakukan sosialisai. Sebab, penggunaan minyak tanah sudah turun-temurun. Dari informasi yang dituturkan oleh Ibu Aisyah terlihat bahwa warga Jember masih belum siap dengan keberadaan Konversi Mitan ke LPG 3kg, namun pada akhirnya Pemkab Jember tetap melangsungkan program tersebut. Nampak dalam hal ini pemerintah kurang begitu memperhatikan mengenai aspek kultural sebagian dari masyarakat Jember yang masih mempercayakan minyak tanah ataupun tungku kayu bakar sebagai pilihan mereka dalam pengolahan kebutuhan pangan.

Kecamatan Kaliwates sabagai salah satu penerima subsidi konversi mitan ke LPG 3Kg, khususnya di Kelurahan Sempusari, dimana pada observasi awal masih dijumpai adanya kalangan masyarakat yang memilih tetap menggunakan kompor minyak dan tungku, bahkan tak jarang mereka menyimpan atau menjual kembali

⁷ (<http://halobbj.blogspot.com>).

subsidi kompor gas tersebut. Pada saat penelitian ini dilakukan masyarakat yang sudah mendapat paket kompor gas bersubsidi berjumlah 83 kepala keluarga. Dari 83 kepala keluarga yang mendapat paket kompor gas bersubsidi diantaranya masih ada yang tetap menggunakan minyak tanah dan kayu bakar meskipun harga minyak tanah per 1 liter sudah 4500 rupiah. Ini dikarenakan perekonomian di wilayah tersebut cukup rendah. Dalam Suharto (2005-132) menyebutkan bahwa kemiskinan memiliki sembilan ciri, salah satunya adalah ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan. Lapangan kerja berhubungan dengan tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin luas lapangan pekerjaan untuknya. Seperti yang dikutip dari profil Kelurahan Sempusari Kabupaten Jember tahun 2007, terlihat bahwa tingkat pendidikan pada Kelurahan Sempusari di dominasi oleh lulusan SLTA sekitar 145 jiwa, yang sebagian besar adalah pendatang. Sedangkan untuk yang penduduk asli justru di dominasi oleh lulusan SD sekitar 121 jiwa dari 549 jiwa. Angka remaja putus sekolah pada Kelurahan Sempusari ini pun cukup tinggi yaitu sekitar 154 jiwa dari 504 jiwa. Informasi ini tidak hanya di dapat dari Profil Kelurahan Sempusari namun juga di dapat dari wawancara yang dilkakukan dengan Kasun Krajan pada observasi awal. Seperti yang kita ketahui bahwa lingkaran setan kemiskinan dapat terbentuk dengan adanya tingkat pendidikan yang rendah dan berkesinambungan dengan pendapatan yang rendah pula. Pendidikan yang rendah serta pendapatan yang rendah bisa jadi salah satu alasan masyarakat tidak menggunakan kompor gas bersubsidi, karena minimnya pendapatan. Padahal pemerintah mengeluarkan program konversi minyak tanah ke LPG 3kg menempatkan masyarakat kurang mampu sebagai sasaran dari sebuah kebijakan sosial tersebut. Pemerintah ingin melindungi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang tidak mampu dari krisis energi global yang melanda seluruh dunia.

Berangkat dari kenyataan diatas, penulis terdorong untuk meneliti kondisi masyarakat di Kecamatan Kaliwates khususnya Kelurahan Sempusari yang menjadi sasaran program tersebut. Dimana dari masing-masing masyarakatnya terjadi

keberagaman pemikiran dalam menyikapi adanya konversi minyak tanah ke kompor gas bersubsidi. Rasionalitas yang muncul dari berbagai macam pertimbangan yang termotivasi oleh adanya sebuah fakta yang masyarakat lihat, alami serta rasakan menjadikan pertimbangan dalam menentukan pilihan. Selain itu selama ini belum ada penelitian yang dilakukan secara ilmiah terkait dengan hal itu, yang sering terjadi hanya berupa ulasan-ulasan dalam tulisan populer seperti dikoran atau di majalah. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul: *Rasionalitas Masyarakat Atas Penolakan Penggunaan Kompor Gas Bersubsidi*.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan suatu hal yang mendasar dan sangat penting. Perumusan masalah merupakan suatu hal yang pertama kali harus dipikirkan sebelum suatu penelitian dimulai. Sebelum melangkah lebih jauh perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian masalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Surachmad (1990:33) bahwa, “Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan masyarakat untuk memecahkan, masalah harus dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang harus dilalui dengan jalan mengatasi apabila kita ingin berjalan terus”.

Tujuan pokok dari sebuah penelitian sosial yang bersifat ilmiah, adalah menjelaskan gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Dalam penelitian sosial tentunya diperlukan satu fokus perhatian peneliti. Fokus penelitian tersebut harus dibatasi ruang lingkupnya yang berfungsi untuk mengidentifikasi hal mana yang termasuk ruang lingkup penelitian dan hal mana yang tidak termasuk. Pembatasan fokus perhatian yang sedemikian rupa disebut permasalahan penelitian.

Sebagaimana telah dikemukakan pada latar belakang, bahwa program konversi minyak tanah ke LPG 3kg merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk penghematan subsidi yang diberikan kepada masyarakat, diakarenakan harga minyak mentah dunia yang selalu meningkat. Pada intinya program tersebut bertujuan agar masyarakat Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Karena dari

penghematan subsidi bahan bakar mentah tersebut dapat dialokasikan untuk subsidi yang lain misalnya untuk bidang pendidikan dan bidang kesehatan di Indonesia.

Selama ini minyak tanah mendapat anggaran subsidi paling besar. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan kebijakan pergantian minyak tanah ke LPG yang akan dilaksanakan serentak secara bertahap. Termasuk Kabupaten Jember yang juga telah melaksanakan program konversi minyak tanah ke LPG 3kg. Namun demikian, pada pelaksanaannya di lapangan, masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan kompor gas bersubsidi dengan berbagai pertimbangan yang didasari rasionalitas berfikir masyarakat, salah satunya di Dusun Krajan Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember yang menjadi lokasi penelitian ini. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan yaitu: *Alasan-alasan apa yang menyebabkan masyarakat berpikir rasional sehingga memutuskan untuk tidak menggunakan kompor gas bersubsidi?*

1.3 Pokok Bahasan

Dalam suatu penelitian ilmiah selalu memerlukan adanya keberadaan batasan masalah. Maksud dari diadakannya tindakan ini adalah untuk menghindari adanya kekaburan topik bahasan sebagai akibat dari perluasan masalah. Dengan adanya pembatasan masalah ini diharapkan dalam penelitian dan pengkajian topik bahasan dapat dilakukan secara lebih mendalam untuk menghindari adanya penyimpangan lebih lanjut obyek yang akan dimasalahkan, selain itu pokok bahasan berfungsi untuk memberikan kejelasan kepada pembaca mengenai arah dari suatu penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1993:17) :

”Dalam suatu penelitian perlu adanya ruang lingkup. Hal ini penting sekali supaya peneliti tidak sampai terjerumus dalam sekian banyak data yang akan di teliti, seringkali seseorang peneliti terlalu bersemangat dalam meneliti sehingga tidak sadar akan kesulitan yang pasti akan dihadapi karena ruang lingkup terlalu luas ”.

Berdasarkan pendapat di atas maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya pokok bahasan mengambil peranan yang sangat penting dalam suatu kegiatan penelitian agar tidak menimbulkan kerancuan, selain itu pokok bahasan sebagai arah dalam mengembangkan materi yang telah dipersiapkan. Berorientasi dari hal tersebut, yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan rasionalitas masyarakat terhadap penggunaan kompor gas bersubsidi. Peneliti akan memfokuskan pada :

a) Alasan Internal, yaitu alasan yang muncul dari dalam individu itu sendiri, yaitu:

1. Kurang paham maksud dan tujuan program konversi minyak tanah ke LPG 3kg.
2. Ketakutan paket bantuan kompor gas bisa meledak.
3. Motif ekonomi, untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
4. Kebiasaan menggunakan kayu bakar dan minyak tanah.

b) Alasan Eksternal, yaitu alasan yang muncul dari luar individu. Dalam hal ini alasan ekstern berhubungan dengan lingkungan sosial individu, yaitu:

1. Pengaruh lingkungan social dalam hal ini tetangga, dan saudara.
2. Maraknya pemberitaan di media elektronik.
3. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Didalam suatu penelitian harus terdapat tujuan yang jelas sehingga penelitian dapat terarah dan dapat di ketahui maksudnya. Menurut Soeharto (1996:129) menyatakan bahwa:

“Tujuan penelitian untuk memberikan jawaban pada masalah penelitian. Sebenarnya dalam merumuskan kerangka penelitian, peneliti sudah mempunyai dan menemukan jawaban daripada masalah-masalah apakah jawaban itu berupa hasil pengamatan (penelitian pendahuluan) atau dengan

mendasarkan pengalaman atau bacaan. Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan mengenai makna yang terkandung dalam permasalahan”.

Suatu penelitian akan menjadi sia-sia jika tanpa arah dan tujuan yang jelas dan pasti. Jadi dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian itu mengarahkan seluruh kegiatan penelitian sehingga tidak terjadi penyimpangan yang menyebabkan penelitian menjadi tidak lagi relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan alasan mengenai rasionalitas masyarakat atas penolakan penggunaan kompor gas bersubsidi. Berdasarkan atas tujuan penelitian di atas maka hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti obyek yang sejenis.
2. Diharapkan dapat dijadikan kajian lebih lanjut dan memberikan gambaran mengenai rasionalitas masyarakat dalam menyikapi kompor gas bersubsidi.
3. Diharapkan dapat di gunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat memberikan wawasan dan kerangka berfikir yang lebih luas kepada penulis dan mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial serta khususnya, masyarakat pada umumnya.
4. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sedikit gambaran tentang rasionalitas pemikiran yang berkembang di tengah masyarakat terkait penolakan penggunaan tabung gas bersubsidi sebagai pengganti keberadaan kompor minyak tanah serta tungku kayu bakar yang selama ini menjadi pilihan utama dalam pengolahan pangan di masyarakat.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan Kualitatif

Pada sebuah penelitian, metode penelitian menjadi landasan gerak yang memegang peranan penting berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana menurut Bogdan dan

Taylor dalam Moleong (2001:3) pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang di amati. Penelitian ini menggunakan case study atau studi kasus yaitu penelitian yang dilakukan pada waktu tertentu pada satu fenomena sosial di satu daerah. Menurut Bungin (2007:104) penelitian studi kasus adalah:

“ciri khas dari data kualitatif adalah menjelaskan kasus-kasus tertentu. Data kasus hanya berlaku untuk kasus tertentu serta tidak bertujuan untuk digeneralisir atau menguji hipotesis tertentu. Lebih memungkinkan data kasus mendalam dan komprehensif dalam mengekspresikan suatu objek penelitian”.

Terkait dengan pengertian tersebut menyebutkan bahwa sebuah data kualitatif menjelaskan kasus-kasus secara lebih mendalam dan tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu sehingga akan diperoleh pemahaman utuh tentang fakta dan kasus yang diteliti. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.2 Metode Penentuan Lokasi

Sebagai suatu proses dalam melakukan penelitian, langkah awal sebelum dilakukannya penelitian adalah menentukan terlebih dahulu wilayah yang akan menjadi lokasi penelitian. rangkaian penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dan menjawab pertanyaan yang telah ditetapkan. Adapun wilayah yang akan dijadikan lokasi penelitian adalah Kelurahan Sempusari Dusun Krajan Rt 2/ Rw 4. Alasan memilih lokasi tersebut adalah karena di lokasi tersebut terdapat permasalahan sebagaimana yang menjadi fokus penelitian ini. Mengingat disana telah dilaksanakan ketiga tahapan dari konservasi minyak tanah ke LPG 3kg, namun hasilnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari adanya kalangan masyarakat yang masih tidak menggunakan paket bantuan kompor bersubsidi tersebut. Padahal jika dilihat secara geografis, Kelurahan Sempusari merupakan salah satu desa yang terletak di daerah perkotaan yang mayoritas masyarakatnya sudah berpikiran maju. Selain itu karena

permasalahan dalam penelitian ini belum pernah diteliti, diharapkan Kecamatan Kaliwates, Kelurahan Sempusari sebagai sampel untuk di Kabupaten Jember dengan mengesampingkan jumlah orang yang tidak menggunakan, karena ini merupakan penelitian awal.

1.5.3 Metode Penentuan Informan

Untuk mencari kemudahan dalam mendapatkan informasi yang diperlukan oleh penulis maka dalam penelitian ini penulis memilih dan memanfaatkan adanya informan. Informan menurut *Meleong (2005:90)* “adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menetapkan informan salah satunya adalah mencari orang yang berwenang dan dipandang, orang yang benar-benar mengerti tentang obyek yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun teknik yang digunakan dalam menentukan informan adalah teknik *purposive*. Menurut Hadi (1989:83), dimana pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang hendak di jawab. Alasan penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, karena ketika melakukan obeservasi awal, ditemukan hanya terdapat delapan orang yang tidak menggunakan paket bantuan kompor gas besubsidi dengan berbagai alasan.

Penentuan informan dipilih dengan disengaja berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan pada penelitian rasionalitas masyarakat atas penolakan penggunaan kompor gas bersubsidi. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis informan yaitu informan pokok (*primary informant*) dan informan tambahan (*secondary informant*), yaitu:

1. Informan Pokok, dalam penelitian ini adalah para wanita atau ibu-ibu rumah tangga yang mendapat bantuan kompor gas bersubsidi, namun tidak menggunakannya. Alasan penulis menentukan informan tersebut, dikarenakan mereka masyarakat yang terlibat langsung atau menjadi sasaran penerima subsidi kompor gas bersubsidi. Selain itu mereka (para ibu rumah tangga) dipilih karena dalam kultur Indonesia persoalan dapur masih menempatkan perempuan pada posisi

paling mengerti dan bertanggung jawab dengan urusan dapur. Sehingga nantinya mereka diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dalam penelitian ini.

2. Informan tambahan dalam penelitian ini juga diperlukan dalam rangka memberikan informasi tambahan sebagai penunjang dari informan pokok. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui dan ikut serta baik secara langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan program konversi minyak tanah ke LPG 3kg, diantaranya:

- a. Kasun Krajan dan Kader Posyandu Aster 65 yang membantu warga dalam mendapatkan paket bantuan kompor gas beserta LPG 3 kg.
- b. Petugas dari Pertamina yang melaksanakan tugas untuk mendistribusikan paket bantuan kompor gas beserta LPG 3kg ke warga Dusun Krajan.
- c. Ibu sekitar informan pokok yang mendapat bantuan dan menggunakan kompor gas bersubsidi.

Alasan penentuan informan tambahan tersebut, dikarenakan mereka mengetahui dan ikut serta baik secara langsung atau tidak langsung dalam pelaksanaan program konversi minyak tanah ke LPG 3kg.

Penentuan informan tersebut menjadi penting adanya dalam memberikan informasi mengenai situasi dan data lain yang di anggap relevan dan bermanfaat bagi penelitian, sehingga pada akhirnya data yang di peroleh menjadi lebih lengkap dan mendalam.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang di gunakan peneliti untuk mencari data yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan dan kelanjutan dari penelitian. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data di lapangan pada penelitian ini adalah :

1.6.1 Observasi

Observasi atau pengamatan langsung kelokasi yang hendak dijadikan objek penelitian. Observasi dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh informasi tentang bagaimana hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilokasi penulisan. Pengertian Observasi menurut Hadi (1990:136) adalah:

“Sebagai pengamatan dan pencacatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan yang tidak langsung misanya questionnaire dan test”.

Metode observasi yang di lakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara peneliti mengadakan pengamatan langsung atas gejala-gejala yang berkaitan dengan obyek permasalahan yang diteliti di lokasi penelitian. Penentuan observasi menurut *Hadi (2004:36)* adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti luas observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan dengan mata kepala sendiri secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa dalam melakukan observasi haruslah benar-benar mengerahkan kepekaan peneliti untuk dapat menangkap, menjelaskan dan menyimpulkan gejala-gejala yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini peneliti melihat langsung lokasi penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Metode observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi langsung yaitu peneliti mengadakan pengamatan yang dilakukan secara langsung pada obyek yang di observasi.

Untuk melakukan penggalian data peneliti datang ke Kelurahan Sempusari, Dukuh Krajan Rt 2/Rw 4, pada pagi menjelang siang hari sekitar pukul 08.00-09.00. waktu penelitian disesuaikan dengan waktu luang para ibu rumah tangga. Karena jika pagi hari, para ibu rumah tangga masih repot dengan urusan rumah tangganya. Selama berada pada lokasi penelitian peneliti melakukan pengamatan mengenai rasionalitas masyarakat atas penolakan peneggunaan kompor gas bersubsidi seperti

melihat dapur yang di miliki oleh ibu rumah tangga yang menjadi fokus penelitian sekaligus mengamati cara ibu rumah tangga ketika memasak dan ketika ibu rumah tangga bersosialisasi pada tetangga sekitar. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap informan baik informan pokok maupun informan tambahan dengan membangun hubungan yang harmonis agar memudahkan peneliti dalam melakukan kegiatan penelitian sehingga memperoleh data yang valid dan mempermudah peneliti dalam melakukan wawancara karena peneliti. Seluruh hasil pengamatan yang di lakukan peneliti di tulis dalam bentuk catatan.

1.6.2. Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan cara mengadakan hubungan secara langsung dengan responden. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara mendalam tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali saja melainkan berulang-ulang penulis tidak hanya percaya dengan begitu saja pada apa yang dikatakan Informan melainkan perlu mengecek ulang kenyataan melalui pengamatan, itulah sebanya cek dan ricek dilakukan secara bergantian dari hasil wawancara kepengamatan dilapangan atau dari informan satu ke informan yang lainnya. Menurut Hadi(1990:192) yang dimaksud interview adalah suatu proses secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain melihat dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya, tampaknya merupakan alat pengumpulan informasi yang langsung tentang berapa jenis data social, baik yang terpendam maupun manifest.

Pelaksanaan wawancara dilakukan secara mendalam (*indepth interview*) wawancara mendalam adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan mengadakan hubungan langsung dengan informan secara detail dan berkelanjutan, agar diperoleh informasi yang dibutuhkan, informasi harus tetap digali selama wawancara berlangsung, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus menyeluruh dan semakin terfokus. Hal ini untuk mendapat data dilapangan dan untuk menghindarkan adanya

pemberian keterangan yang bisa melebar, sehingga data yang terkumpul untuk dapat mendukung memecahkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Pelaksanaan wawancara mendalam tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali saja, melainkan berulang-ulang. Penulis tidak hanya percaya begitu saja pada apa yang dikatakan informan, melainkan perlu mengecek ulang dalam kenyataan melalui pengamatan. Itu sebanya *cross check* dilakukan secara bergantian dari hasil wawancara kepengamatan dilapangan atau dari informan satu ke informan yang lainnya.

Penulis melakukan wawancara kepada informan yang mengetahui tentang masalah yang penulis ajukan, yaitu resistensi masyarakat terhadap kompor gas bersubsidi. Sebelumnya penulis membuat janji terlebih dahulu kemudian mengajukan permohonan akan melakukan wawancara tentang permasalahan yang dimaksudkan, untuk kemudian meminta bantuan informan memberikan informasi atau keterangan sepanjang yang informan ketahui. Nantinya proses wawancara akan berjalan sesuai dengan pedoman yang penulis ajukan kepada informan sambil menjelaskan tujuan dari diadakannya penulisan atau wawancara ini. Susunan wawancara atau pertanyaan yang dilakukan oleh penulis hanya bersifat *guide interview*, yaitu dibantu dengan panduan wawancara yang telah dibuat, tetapi dalam hal ini panduan wawancara tersebut tidak penulis tunjukkan kepada informan, untuk itu sebelum wawancara berlangsung penulis harus sudah siap betul dengan apa saja yang akan ditanyakan, namun yang dilakukan tetap bersifat terbuka agar didapatkan informasi yang lebih banyak lagi.

Wawancara yang di lakukan oleh peneliti pada saat penelitian tidak di batasi oleh waktu dan tempat. Pada saat keadaan memungkinkan dan kondisi harmonis peneliti melakukan wawancara kepada informan. Wawancara biasanya di lakukan pada saat informan memiliki waktu senggang, sehingga proses wawancara dapat berjalan dengan suasana santai namun tetap terarah kepada topik penelitian. Dari kegiatan wawancara selama penelitian, hanya sebagian kecil dari informan yang bersedia untuk di rekam pembicaraannya. Informan merasa kurang nyaman

dengan keberadaan *tape recorder* dan merasa pembicaraan menjadi kurang menyenangkan. Oleh sebab itu peneliti berusaha mencatat hasil wawancara pada saat wawancara berlangsung atau setelah proses wawancara berakhir.

Wawancara yang di lakukan peneliti sempat mengalami beberapa kendala yaitu diantaranya informan pokok yang bekerja di pabrik sehingga cukup sulit untuk di temui dikarenakan kesibukan dan keterbatasan waktu beliau, namun peneliti sempat menemui walau hanya beberapa kali. Kendala lain yang peneliti hadapi adalah proses wawancara yang berjalan terputus-putus karena ibu rumah tangga yang harus mengerjakan pekerjaan lain sehingga proses wawancara memakan waktu yang relatif cukup lama. Namun dalam hal ini peneliti tetap berusaha untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya.

1.6.3 Metode Dokumentasi

Dokumentasi sebagai salah satu sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk mengambil dan mengumpulkan peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan masalah obyek penulis. Metode dokumentasi menurut Arikunto (2001:180) adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa cacatan, makalah, buku, surat kabar. Dengan demikian metode dokumentasi merupakan upaya pengumpulan data melalui dokumen yang ada sesuai dengan kebutuhan penulisan. Dokumen ini bisa berasal dari dokumen resmi maupun dokumen pribadi.

Dokumen yang dimaksud antara lain buku saku tentang program konversi minyak tanah ke LPG 3kg, koran atau media massa, ada pula dokumen yang diakses melalui internet. Semua dokumen yang dijelaskan diatas tentunya dapat dijadikan sumber informasi maupun data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yaitu rasionalitas masyarakat atas penolakan penggunaan kompor gas bersubsidi.

1.7 Metode Analisis Data

Analisis dimulai data dimulai oleh peneliti semenjak turun lapangan selama proses pengumpulan data dilapangan. Analisis data merupakan keharusan bagi penulis setelah kegiatan pengumpulan data dan kemudian melakukan proses analisis. Dalam penelitian ini penulis dalam menganalisa data menggunakan deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2006:6). Deskriptif kualitatif adalah suatu analisis yang menggunakan keadaan objek penelitian yang berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Dengan demikian laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran fenomena dilapangan. Penelitian ini akan menjelaskan tentang alasan-alasan rasional yang mempengaruhi masyarakat sehingga memutuskan untuk tidak menggunakan paket bantuan kompor gas bersubsidi.

Pada penelitian ini proses analisis data secara keseluruhan dimulai dengan menelaah seluruh data mentah yang tersedia dari berbagai sumber seperti wawancara, pengamatan, atau observasi yang ditulis dalam catatan lapangan dan dokumentasi dan transkrip wawancara. Data tersebut kemudian dibaca, dipelajari, ditelaah, kemudian direduksi atau dipilah sesuai dengan kategori-kategori tertentu sehingga mendapatkan gambaran yang jelas terhadap fakta sosial yang ada di lapangan.

Selanjutnya, mengabstraksikan data tersebut dengan berpegang pada fokus penelitian yang telah ditentukan serta keaslian data. Hasil dari abstraksi kemudian dianalisa berdasarkan kerangka pemikiran, konsep-konsep atau teori-teori yang digunakan kemudian dideskripsikan, setelah itu baru diinterpretasikan.

1.8 Metode Keabsahan Data

Metode keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian sosial yang secara metode menggunakan pendekatan kualitatif. Karena dalam penelitian yang bersifat empiris, informasi yang diberikan maupun perilaku masing-masing informan mempunyai makna sehingga tidak dapat langsung diterima begitu saja, oleh karenanya harus dilakukan pengujian keabsahan data, yang pada penelitian ini dilakukan dengan cara Triangulasi.

Triangulasi menurut Meleong (2005:320) adalah teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui jalan membandingkan data dari hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang di katakan informan lain, membandingkan antara data yang di kemukakan informan di depan umum dan di kemukakan secara pribadi, membandingkan antara praktek pelaksanaan di lapangan dengan peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku, membandingkan hasil wawancara dengan situasi sosialnya (observasi).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan sumber untuk mengecek keabsahan data dilapangan. Menurut Patton dalam Meleong (2005:330-331): “Triangulasi adalah mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif”. Dengan Triangulasi sumber peneliti mengecek data dengan cara:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, dan orang yang berpendidikan.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam suatu penelitian ilmiah sangat diperlukan kerangka teoritis sebagai tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menyederhanakan dan memberi landasan serta kerangka berfikir berupa teori mengenai fakta sosial yang menjadi obyek penelitian. Pada dasarnya di dalam penelitian kualitatif menggunakan beberapa model teorisasi, namun pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan teorisasi deduktif. Model penggunaan teorisasi deduktif inilah yang biasa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif. Pengertian teori menurut Bungin (2007:28):

”Teori digunakan sebagai awal menjawab pertanyaan penelitian bahwa sesungguhnya pandangan deduktif menuntun penelitian dengan terlebih dahulu menggunakan teori sebagai alat, ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis sebagai peneliti secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai ”kacamata kuda”nya dalam melihat masalah penelitian”.

Tanpa landasan teori yang kuat maka akan menimbulkan kekaburan dalam kegiatan mengumpulkan data di lapangan karena pada hakekatnya tinjauan pustaka dapat dipergunakan sebagai pedoman yang dapat membantu memperlihatkan hubungan antara konsep-konsep yang menjadi variabel penelitian. Tinjauan pustaka selalu berpegang pada suatu konsep atau teori yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang maka kerangka teori yang digunakan adalah sesuai dengan judul yaitu ”Rasionalitas Masyarakat Atas Penolakan Penggunaan Kompor Gas Bersubsidi”.

2.2 Teori Kebutuhan dan Konsep Kesejahteraan Sosial

Pemerintah merupakan salah satu lembaga *human service organization* dimana dalam mengeluarkan suatu kebijakan harus memperhatikan kebutuhan sasaran yang ingin dicapai agar kebijakan tersebut tepat dan efektif. Goodin dalam Adi (2007:70) menjelaskan bahwa kebutuhan memiliki dua komponen yaitu prioritas

dan kerelatifan. Prioritas maksudnya kebutuhan yang terbentuk atas proses pengetahuan dan kesadaran masyarakat sendiri bahwa mereka benar-benar membutuhkannya dan tidak dapat digantikan dengan yang lain. Sedangkan kebutuhan yang bersifat relatif akan tergantung pada unsur waktu, tempat dan lingkungannya.

Disamping Goodin yang melihat kebutuhan dari segi absolut dan relatifnya, kebutuhan manusia dapat dilihat dari tipologi yang lain seperti yang dikemukakan oleh Bradshaw (1972) dalam Adi (2007:73) membagi kebutuhan menjadi empat bentuk yaitu:

1. Kebutuhan Normatif, yaitu kebutuhan yang didefinisikan oleh mereka (sekelompok orang) yang memiliki otoritas dan disesuaikan dengan standar ataupun norma yang ada. Misalnya garis kemiskinan.
2. Kebutuhan yang dipersepsikan atau dikenal juga dengan nama kebutuhan yang dirasakan ini merupakan kebutuhan yang dipikirkan harus mereka dapatkan ataupun kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat.
3. Kebutuhan yang diekspresikan, merupakan kebutuhan yang diungkapkan oleh komunitas sasaran dan mencari berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam hal ini merupakan tindak lanjut dari kebutuhan yang dipikirkan dan dirasakan dimana dalam kebutuhan ini terlihat adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
4. Kebutuhan relatif, kebutuhan ini berfokus pada kesenjangan antara jenis layanan yang diberikan pada suatu masyarakat dengan masyarakat di area yang berbeda.

Menurut Maslow tentang teori hierarki dalam Koswara (1991:120) kebutuhan manusia terdiri atas lima lapis jenjang vertical yaitu:

1. Kebutuhan Fisiologis (*Physiological Needs*), yaitu kebutuhan yang paling mendasar, seperti: sandang, pangan, papan, bernafas, buang air besar, buang air kecil, dll.
2. Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan (*Safety dan Security Needs*) yaitu,

kebutuhan ini muncul dan memainkan peranan dalam bentuk mencari tempat perlindungan. Misalnya membangun privacy individual, mengusahakan “keterjaminan” financial melalui asuransi/ dana pension, bebas dari penajahan, bebas dari ancaman, dsb.

3. Kebutuhan Sosial (*Sosial Needs*) yaitu, ketika kita ingin memiliki persahabatan, menjadi bagian dari sebuah kelompok, dan kebutuhan cinta dari lawan jenis.
4. Kebutuhan Penghargaan atau Pengakuan (*Esteem Needs*) yaitu, pada level ke empat ini Maslow membedakannya menjadi dua, yaitu: Tipe bawah: kebutuhan akan penghargaan dari orang lain, status, perhatian, reputasi, kebanggaan diri, kemahsyuran. Tipe atas: penghargaan oleh diri sendiri, seperti kebebasan, kecakapan, ketrampilan, dan kemampuan khusus.
5. Kebutuhan Aktualisasi Diri yaitu, adalah kebutuhan untuk bertindak sesuka hati sesuai dengan bakat dan minatnya.

Pada konteks ini pemenuhan kebutuhan yang digunakan adalah kebutuhan fisiologis dan kebutuhan keamanan dan keselamatan. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan berhubungan dengan basic need setiap orang, dan setiap manusia ketika berusaha untuk memenuhi kebutuhannya berharap mendapatkan rasa aman dari segala ancaman. Apabila basic neednya tidak terpenuhi maka kesejahteraan sosialnya masih belum terpenuhi.

Dikaitkan dengan program konversi minyak tanah ke LPG 3kg, pemerintah mendasarkan, bahwa program tersebut sebenarnya diperuntukan untuk masyarakat dengan kriteria tertentu, agar dapat beralih dari minyak tanah ke paket bantuan kompor gas bersubsidi untuk memenuhi kebutuhannya. Program konversi minyak tanah ke LPG ini merupakan suatu bentuk dari perlindungan sosial yang mana dalam arti luas, perlindungan sosial dapat di definisikan sebagai segala inisiatif baik yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan transfer pendapatan atau konsumsi kepada orang miskin, melindungi

kelompok rentan terhadap resiko-resiko penghidupan (*livelihood*) dan meningkatkan status serta hak-hak sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan di dalam suatu masyarakat (dalam Suharto, 2007:87).

Perlindungan sosial merupakan elemen penting strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang di alami oleh kelompok-kelompok lemah dan juga kelompok yang kurang beruntung. Sebagai sebuah kebijakan publik, maka perlindungan sosial merupakan satu tipe kebijakan sosial yang menunjuk kepada berbagai bentuk pelayanan atau program yang di kembangkan pemerintah untuk melindungi warganya terutama kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung dari berbagai macam resiko ekonomi, sosial, politik yang senantiasa menerapkan kehidupan mereka.

Kebijakan dan program perlindungan sosial, khususnya untuk konteks Indonesia, mencakup tiga komponen (dalam Suharto, 2007:88) menerangkan beberapa kelompok rentan yang menjadi target utama perlindungan sosial.

1. Bantuan Sosial (*sosial assistance*). Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk program jaminan sosial (*sosial security*) yang berupa tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya di berikan kepada populasi paling rentan atau yang tidak memiliki penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Asuransi Sosial (*sosial insurance*). Sebagaimana bantuan sosial asuransi sosial juga merupakan satu skema jaminan sosial. Bedanya asuransi sosial hanya di berikan kepada para peserta sesuai dengan kontribusinya berupa premi atau tabungan yang dibayarkan. Asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, asuransi hari tua atau pensiun serta asuransi kematian adalah beberapa bentuk asuransi yang banyak di terapkan oleh banyak Negara.
3. Jaminan Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (*community based sosial welfare security*). Dikenal denangan istilah jaring pengaman sosial berbasis masyarakat lokal yang diarahkan untuk mengatasi kerentanan pada tingkat komunitas. Di Indonesia misalnya sebagaimana yang di

kembangkan oleh Departemen Sosial yaitu asuransi pertanian, dan dana sosial yang juga dapat di masukan kedalam jaring pengaman sosial berbasis masyarakat.

Perlindungan sosial merupakan bagian dari, dan berfungsi sebagai, sarana pembangunan sosial. Perlindungan sosial merupakan strategi kebijakan sosial dalam mendorong keberlanjutan kehidupan dalam masyarakat, sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial, serta prinsip fundamental dari pekerjaan sosial. Menurut Shepherd, Marcus, dan Barrientos (2005:5) dalam Suharto (2005:123), perlindungan sosial merujuk pada proses, kebijakan serta berbagai intervensi yang dilakukan guna merespon resiko ekonomi, politik dan sosial, terutama yang dihadapi oleh kelompok rentan dan miskin agar dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam berpartisipasi dalam pembangunan. Perlindungan sosial adalah skema yang melembaga untuk melindungi orang dari berbagai resiko yang mengancam kehidupannya, mulai dari sakit hingga kematian, kecelakaan kerja hingga pensiun.

Skema bantuan sosial ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara memangkas kemiskinan secara langsung. Bantuan sosial antara lain berbentuk penyediaan pelayanan sosial dan kesejahteraan bagi kelompok rentan; pemberian bantuan berupa uang dan barang, seperti kupon makan dan tunjangan keluarga; serta pemberian subsidi sementara, seperti subsidi perumahan atau kebijakan yang mendukung diturunkannya harga barang-barang pokok selama krisis. Kelompok rentan merupakan sasaran utama kebijakan bantuan sosial, termasuk diantaranya kelompok dengan keterbatasan fisik dan mental, kelompok etnis minoritas serta masyarakat yang hidup di daerah terpencil dan minim infrastruktur, para yatim piatu, keluarga dan orang tua tunggal, para pengungsi, serta kelompok penganggur yang tidak termasuk ke dalam katagori asuransi sosial. Desain progam bantuan sosial yang efektif dan efisien, erat kaitannya dengan kemampuan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan *eligibility* (kelayakan) penerima bantuan (misalnya seseorang yang berada di bawah garis standar kebutuhan, atau melalui means testing, yakni tes kepemilikan/ kekeyaan seseorang untuk menentukan berhak-

tidaknya seseorang memperoleh bantuan pemerintah, dan penentuan target penerima bantuan), serta administrasi (seperti sistem peminjaman klaim, dan hal yang berhubungan dengan sistem administrasi lainnya).

Bantuan sosial tidak serta merta diberikan begitu saja. Ada syarat atau kriteria yang digunakan agar bantuan tersebut tepat sasaran. Begitu pula ketika pemerintah akan mengeluarkan suatu kebijakan. Ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Produk dari kebijakan pemerintah tentang konversi minyak tanah ke LPG 3kg berupa paket kompor gas beserta tabung LPG 3kg merupakan suatu bentuk konkret dari bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat dengan kriteria, seperti yang dikutip pada buku saku Konversi Minyak Tanah ke LPG 3kg:

1. Rumah Tangga. Rumah tangga yang berhak menerima paket bantuan kompor gas beserta tabung LPG 3kg dan kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
 1. Ibu rumah tangga.
 2. Pengguna minyak tanah murni.
 3. Kelas sosial C1 kebawah (pengeluaran < 1,5 juta perbulan).
 4. Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat.
2. Usaha Mikro. Usaha mikro yang berhak menerima paket bantuan kompor gas bersubsidi beserta tabung LPG 3kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
 1. Usaha mikro tersebut merupakan pengguna mitan untuk bahan bakar memasak dan usahanya.
 2. Penduduk legal setempat dengan dibuktikan dan melampirkan KTP atau KK atau surat Keterangan dari Kelurahan setempat.
 3. Melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.

Apabila dalam proses distribusi paket bantuan bersubsidi secara gratis kepada masyarakat terdapat anggota masyarakat (Rumah Tangga atau Usaha Mikro) yang tidak memenuhi persyaratan diatas, akan tetapi sesuai kriteria berhak

mendapatkan paket bantuan kompor gas beserta tabung LPG 3kg secara gratis (contoh: penduduk musiman yang tidak memiliki KTP/KK/Surat Keterangan dari kelurahan setempat,) maka dapat diberikan paket bantuan dengan melampirkan:

1. Surat Keterangan dari Kelurahan setempat, atau
2. Surat Keterangan RT/RW setempat, atau
3. Berita Acara serah terima distribusi antara konsultan dengan penerima paket dilampiri dengan fotocopy kartu identitas yang bersangkutan.⁸
4. Seperti yang sudah dijelaskan pada awal bahwa pelaksanaan program ini atas dasar Surat Menteri Energi Sumber Daya Mineral, No.3249/26/MEM/ 2006, tanggal 31 Agustus 2006, Perihal : Hasil rapat Koordinasi Terbatas yang dipimpin oleh Wakil Presiden mengenai diversifikasi minyak tanah ke LPG 3kg (Pertamina di tunjuk untuk melaksanakan Konversi Minyak Tanah ke LPG bagi Konsumen rumah tangga). Surat Wakil Presiden RI No.20/ WP/ 9/2006 tanggal 1 September 2006. Perihal : Konversi Pemakaian Mitan ke LPG. Program ini akan dilaksanakan secara bertahap ke seluruh Indonesia.

Salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ialah dengan membuat suatu kebijakan berupa program yang berpihak pada rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Pasal 3 Bab II, yang membahas tujuan kesejahteraan sosial dapat di definisikan bahwa:

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.⁹

⁸ (sumber: buku saku Konversi minyak tanah ke LPG 3kg)

⁹ (sumber: http://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_11_Tahun_2009)

Jika di tinjau dari tujuan mengenai Kesejahteraan Sosial menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009, menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan agar terpenuhinya secara ideal tatanan kehidupan yang meliputi kehidupan material maupun spiritual secara seimbang. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan berusaha mewujudkan diri untuk membantu, mengembangkan, dan mendukung terciptanya peningkatan taraf hidup individu, keluarga, ataupun masyarakat sebagai salah satu upaya dalam pembangunan sosial dan sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat, dimana inti dari pembangunan sosial adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, termasuk unit-unit didalamnya seperti individu dan keluarga. Dari hal ini dapat di simpulkan bahwa setiap individu berhak atas terpenuhinya kesejahteraan sosial bagi dirinya.

Keadaan tersebut di atas akan tercapai dengan baik, jika keadaan masyarakat berada pada taraf kesejahteraan sosial yang baik dan merata di seluruh tanah air. Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan kelebihan kompor gas dibandingkan kompor minyak tanah, karena berbagai faktor lingkungan. Bila dikaitkan dengan kebutuhan akan rasa aman, yang menurut Maslow dalam Koswara (1991:120) adalah sesuatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan keteraturan dari keadaan lingkungannya. Peningkatan urgensi atau mendesakny kebutuhan akan rasa aman itu juga bisa terjadi akibat pengalaman.

Hal inilah yang menyebabkan kecemasan pada diri masyarakat ketika akan menggunakan kompor gas, Freud dalam Koswara (1991:44) mengungkapkan ada tiga jenis kecemasan yaitu, kecemasan riil, kecemasan neurotik, dan kecemasan moral. Bila diamati kasus tabung LPG dijual yang terjadi ini merupakan sebuah masalah masyarakat yang jika di biarkan akan menjadi terjadi masalah sosial. Menurut Burgess dalam Sumarnonugroho (1984:11) berpendapat bahwa teori tentang masalah sosial dapat dikelompokkan menjadi lima aspek, yaitu:

1. Masalah sosial sebagai patologi organik individual.
2. Masalah sosial sebagai patologi sosial.

3. Masalah sosial sebagai disorganisasi personal dan sosial.
4. Masalah sosial sebagai konflik nilai.
5. Masalah sosial sebagai proses.

Masalah sosial merupakan masalah yang sudah sistemik. Kasus paket bantuan kompor gas bersubsidi beserta tabung LPG 3kg yang dijual kembali, merupakan problem masyarakat yang lama-kelamaan jika tidak ditangani akan menjadi masalah sosial sebagai proses. Dimana masalah yang ada akan semakin kompleks dan semakin rumit untuk ditangani.

2.3 Konsep Kemiskinan

Kualitas SDM (sumber daya manusia) yang rendah, sangat erat dengan kemiskinan, dan tidak bisa dipisahkan lagi. Hal ini diawali dengan tingkat pendidikan rendah, akan berdampak pada pola pikir, cara pandang, wawasan dan tingkah laku masyarakatnya. Sehingga akan menjadi lingkaran setan atau biasa disebut dengan kemiskinan. Spicker (1995:13) yang dikutip oleh Adi (2005) menempatkan bidang pendidikan pada posisi nomor dua setelah kesehatan dari lima bidang indikator standart minimum bagi terpenuhinya standart kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, perumahan, dan pekerjaan sosial.

Pendidikan yang rendah dinyatakan sebagai faktor penghambat sosial individu atau masyarakat juga ditegaskan oleh teori Darwin dalam Partono (2007:5) yang berpendapat bahwa ada lima indikator kemiskinan yaitu :

1. Persentase penduduk yang tidak bisa mencapai usia 40 tahun.
2. Angka melek huruf untuk orang dewasa.
3. Persentase penduduk tanpa akses air sehat.
4. Persentase penduduk layanan kesehatan.
5. Persentase jumlah balita yang kekurangan gizi.

Teori tersebut mendukung pernyataan Spicker bahwa standart terpenuhinya kesejahteraan sosial adalah masyarakat yang sadar akan pendidikan. Dalam kasus ini, warga yang tidak menggunakan paket bantuan kompor gas beserta tabung LPG 3kg bisa dilihat dari seberapa warga mengerti dan paham dalam menangkap maksud dan

tujuan dari adanya konversi minyak tanah ke LPG 3kg. Semakin rendah pendidikan seseorang maka pola pikirnya pun semakin rendah berlaku sebaliknya.

2.4 Konsep Motivasi dan Tindakan Sosial

Individu berperilaku dikarenakan adanya dorongan berupa motif. Motif merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan, dan memelihara perilaku manusia. Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut motivasi atau motif, dalam Handoko, (1999:252) motivasi diartikan sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan.

Teori-teori motivasi dapat diklarifikasikan menjadi tiga kelompok, petunjuk, isi dan proses pada konteks ini teori yang digunakan adalah teori motivasi isi dan proses dimana teori isi kadang-kadang disebut teori kebutuhan karena berkenaan dengan apa penyebab-penyebab perilaku individu ataupun masyarakat tertentu. Manusia merupakan makhluk hidup, makhluk yang berkembang. Dalam Ahmadi, (2003:140) mengatakan manusia berbuat dan bertindak juga ditentukan oleh faktor-faktor yang datang dari dalam dirinya yang menjadi pendorong untuk berbuat. Dorongan yang datang dalam dirinya untuk berbuat itu dinamakan motif.

Dapat dikatakan bahwa motif merupakan suatu kekuatan yang terdapat dalam diri manusia yang menyebabkan manusia itu bertindak dan berbuat. Dorongan ini atas maksud dan tujuan tertentu. Bila individu menghadapi bermacam-macam motif pada beberapa kemungkinan respons yang dapat diambil, salah satunya pemilihan atau penolakan. Dalam hal ini individu dihadapkan kepada situasi di mana individu harus memberikan salah satu respons (pemilihan atau penolakan) dari beberapa macam obyek atau situasi yang dihadapi.

Berbicara tentang perilaku menurut pemikiran Mead membedakan antara perilaku lahiriah dan perilaku tersembunyi. Menurutnya dalam Ritzer,(2005:293): Perilaku tersembunyi adalah proses berpikir yang melibatkan simbol dan arti. Perilaku lahiriah adalah perilaku sebenarnya yang dilakukan oleh seorang aktor.

Beberapa perilaku lahiriah tidak melibatkan perilaku tersembunyi (perilaku karena kebiasaan atau tanggapan tanpa pikir terhadap rangsangan eksternal). Tetapi, sebagian besar tindakan manusia melibatkan kedua jenis perilaku itu. Perilaku tersembunyi menjadi sasaran perhatian utama teoritis teori pertukaran atau penganut behaviorisme tradisional pada umumnya. Dalam proses interaksi sosial, manusia secara simbolik mengkomunikasikan arti terhadap orang lain yang terlibat. Orang lain menafsirkan simbol komunikasi itu dan mengorientasikan tindakan balasan mereka berdasarkan penafsiran mereka. Dengan kata lain, dalam interaksi sosial, para aktor terlibat dalam proses saling mempengaruhi.

2.5 Konsep Tentang Rasionalitas

Motivasi mendorong individu berperilaku yang dianggapnya rasional. Rasionalitas itu sendiri menurut Weber dalam Habermas, (2006:212) bisa berarti sesuatu yang sangat berbeda. Suatu rasionalitas bisa berarti proses rasionalitas yang dilakukan oleh seorang pemikir sistematis terhadap citraan dunia. Meningkatnya citraan teoritis atas realita melalui konsep-konsep abstrak yang semakin tepat. Rasionalitas juga bisa berarti keberhasilan mencapai tujuan yang defenitif, tertentu, dan praktis secara metodis lewat perhitungan yang semakin lama semakin tepat tentang saran yang akan digunakan. Menurut Weber dalam Ritzer,(2003:37), tindakan manusia tanpa terkecuali sepanjang yang dimaksudnya sebagai tindakan yang menyatakan keterlibatan manusia secara individual pantas dikategorikan sebagai fakta sosial (*social fact*). Dengan mempelajari tindakan sosial yang dilakukan seorang individu, diharapkan dapat mengungkapkan realitas masyarakat.

Dengan adanya rasionalitas maka seseorang akan menemukan berbagai permasalahan baik permasalahan sosial, ekonomi, politik, budaya, ilmiah, yang semuanya akan menjadikan perubahan yang signifikan dalam semua aspek. Weber dalam Jonson, (1994:220) mengklarifikasikan tindakan sosial berdasarkan konsep rasionalitas. Yang pertama adalah tindakan rasional yang berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan, sedangkan tipe

yang kedua adalah tindakan non rasional. Masih menurut Weber ada empat macam tindakan sosial dalam Jhonson, (1994:220-221) yaitu:

1. Rasionalitas Instrumental (Zweckrasionalitat)
Tingkat rasionalitas yang paling tinggi ini meliputi pertimbangan dan pilihan yang sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat yang digunakannya untuk mencapainya.
2. Rasionalitas yang Berorientasi pada Nilai (Wertrationalitat)
Dibandingkan dengan rasionalitas, sifat rasionalitas yang berorientasi pada nilai yang penting adalah bahwa alat-alat hanya merupakan objek pertimbangan dan perhitungan yang sadar, tujuan-tujuannya sudah ada dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut atau merupakan nilai akhir baginya.
- 3 Tindakan Tradisional
Tindakan tradisional merupakan tipe tindakan sosial yang bersifat non rasional. Kalau seseorang individu memperlihatkan perilaku karena kebiasaan, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan, perilaku seperti ini digolongkan sebagai tindakan tradisional.
- 4 Tindakan Afektif
Tipe tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Tindakan ini merupakan tipe tindakan yang tidak rasional karena kurangnya pertimbangan logis, ideologis atau kriteria rasionalitas lainnya.

Kata tindakan dipakai oleh Weber untuk perbuatan-perbuatan si pelaku mempunyai arti subjektif (*gemeinter sinn*). Mereka dimaksudkan, pelaku hendak mencapai suatu tujuan atau didorong oleh motivasi. Secara teoritik memahami tindakan masyarakat juga dapat diamati dengan memperlihatkan pilihan rasionalnya. Maka dalam hal ini, penulis juga menggunakan teori pilihan rasionalitas untuk memperkuat analisis rasionalitas tindakan masyarakat. Menurut Ritzer (2006:356), teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada proses pembuatan keputusan individual. Dimana dalam sebuah sistem tindakan yang terbentuk seorang aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Artinya, aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan, nilai, keperluan, hal ini menunjukkan tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan.

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember dan Kecamatan Kaliwates

Secara geografis Kabupaten Jember terletak pada posisi 6°27'9" sampai dengan 7°14'35" Bujur timur dan 7°59'6" sampai dengan 8°33'56" Lintang Selatan. Berbentuk dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan, dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas Utara dan Timur serta Samudra Indonesia sepanjang batas selatan dengan pulau Nusabarong yang merupakan satu-satunya pulau yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Letaknya yang strategis karena berada dipersimpangan antara Surabaya dan Bali, sehingga perkembangannya cukup pesat dan menjadi barometer ekonomi di kawasan Timur, Provinsi Jawa Timur.

Sebagai daerah otonom, Kabupaten Jember memiliki batas-batas teritorial, luas sumber wilayah, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial politik dan sosial budaya serta sumber daya manusia. Kondisi obyektif yang demikian dapat mengungkapkan berbagai karakteristik sumber daya alam, komoditas yang dihasilkan, mata pencaharian penduduk, keadaan serta ekonomi dan sosial budaya yang mencerminkan kekuatan sebagai suatu kompetisi daerah, sekaligus beragam permasalahan yang dihadapinya.

Batas wilayah Kabupaten Jember meliputi:

- Sebelah Utara : Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo.
- Sebelah Timur : Kabupaten Banyuwangi.
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia.
- Sebelah Barat : Kabupaten Lumajang.

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 Km² atau 329.333,94 Ha. Dari segi topografi sebagian Kabupaten Jember di wilayah bagian selatan Kabupaten jember memiliki luas wilayah 3.293,34 Ha. Dari segi topografi sebagian Kabupaten Jember di wilayah bagian selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur untuk

pengembangan tanaman pangan, sedangkan bagian utara merupakan perbukitan dan bergunung-gunung yang merupakan daerah yang kurang cocok untuk pengembangan dan perekonomian. Dari luas wilayah tersebut terbagi berbagai kawasan :

Tabel 3.1 Pembagian Wilayah Kelurahan Sempusari

| Kawasan | Luas Tanah | |
|---------------------|-------------------|----|
| Hutan | 121.039,61 | Ha |
| Perkampungan | 31.877 | Ha |
| Sawah | 86.568,18 | Ha |
| Tegal | 43.522,84 | Ha |
| Perkebunan | 34.590,46 | Ha |
| Tambak Perkebunan | 368,66 | Ha |
| Rawa | 35,62 | Ha |
| Semak/Padang rumput | 289,06 | Ha |
| Tanah rusak/tandus | 1.469,26 | Ha |
| Lain-lain | 9.586,26 | Ha |

Sumber: Profil kelurahan Sempusari tahun 2007

Disamping itu kabupaten Jember juga masih menyimpan potensi alam yang belum terolah dan dimanfaatkan dengan baik. Salah satu dari potensi alam tersebut adalah potensi bahan galian. Potensi bahan galian tersebut meliputi batu gunung vulkanik yang terdapat di Kecamatan Pakusari dan Kalisat. Sedangkan mangan dan batu gamping terdapat di Kecamatan Puger dan Wuluhan, Tanah Liat terdapat di Kecamatan Ledokombo, Arjasa dan Rambipuji. Batu kali/pasir terdapat hampir diseluruh wilayah Kecamatan Kalisat dan Pakusari.

Kabupaten Jember pada dasarnya tidak mempunyai penduduk asli. Hampir semuanya pendatang, mengingat daerah ini tergolong daerah yang mengalami perkembangan sangat pesat khususnya di bidang perdagangan, sehingga memberikan

peluang bagi pendatang untuk berlomba-lomba mencari penghidupan di daerah ini. Mayoritas penduduk yang mendiami Kabupaten Jember adalah suku Jawa dan Madura, disamping masih ada suku-suku lain serta warga keturunan asing sehingga melahirkan karakter khas Jember dinamis, kreatif, sopan dan ramah tamah. Dari registrasi penduduk Kabupaten Jember pada akhir tahun 1999 tercatat sebanyak 2 106 632 jiwa, dengan sex ratio sebesar 95.16% yang artinya bahwa jumlah penduduk perempuan 4.84% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki.

Pada tahun 1999 kepadatan penduduk kabupaten Jember rata-rata sebanyak 829.96 jiwa/Km² ini berarti ada kenaikan sebesar 0.82%/Km², dibanding keadaan tahun 1998. Kecamatan paling padat penduduknya adalah kecamatan Kaliwates dan disusul kecamatan Sumpalsari, masing-masing dengan kepadatan sebesar 3.400.56 dan 2.859.17 jiwa/Km², sedangkan kecamatan Tempurejo adalah kecamatan paling jarang penduduknya dengan kepadatan rata-rata hanya 288.16 penduduk per Km² nya. Dari total penduduk Jember tersebut diatas 706 jiwa diantaranya adalah warga negara asing, yang tersebar ke 12 kecamatan di Kabupaten Jember.¹⁰ Seperti yang telah dijelaskan bahwa Kecamatan Kaliwates merupakan kecamatan yang penduduknya paling padat ini memiliki luas wilayah 24,94 Km² dengan ketinggian rata-rata 32 m dari atas permukaan laut. Kecamatan Kaliwates terdiri dari 7 kelurahan yaitu: Mangli, Sempusari, Kaliwates, Tegal Besar, Jember Kidul, Kepatihan, Kebon Agung. Seluruh Desa Berkualifikasi Desa Swadaya. Dan memiliki batas kecamatan sebagai berikut:

| | |
|-----------------------|--|
| Batas sebelah utara | : Kecamatan Kaliwates |
| Batas sebelah timur | : Kecamatan Patrang |
| Batas sebelah selatan | : Kecamatan Sumpalsari Kecamatan Ajung |
| Batas sebelah barat | : Kecamatan Sukorambi. |

¹⁰ (sumber: Pemda Jember On-line.)